

BAB I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penyidikan tindak pidana korupsi merupakan salah satu aspek yang sangat penting dalam upaya memberantas praktik-praktik korupsi di dalam suatu negara. Korupsi telah lama menjadi masalah serius yang menggerogoti fondasi pemerintahan yang baik, pembangunan ekonomi, serta keadilan sosial di Indonesia. Fenomena korupsi tidak terbatas pada satu sektor atau institusi tertentu, tetapi telah merasuki berbagai lapisan masyarakat, termasuk di dalamnya adalah aparatur sipil negara. Salah satu bentuk korupsi yang cukup meresahkan adalah korupsi gaji aparatur sipil negara. Dalam konteks ini, Kejaksaan Negeri Ternate telah memainkan peran kunci dalam menyelidiki dan menindak pelaku tindak pidana korupsi terkait korupsi gaji ASN. Penyidikan ini menjadi esensi penting dalam menegakkan hukum dan memastikan bahwa keadilan sosial serta transparansi dalam pengelolaan keuangan publik dapat terwujud di Ternate.

Latar belakang mengenai penyidikan tindak pidana korupsi di Kejaksaan Negeri Ternate perlu dipahami dalam konteks lebih luas tentang masalah korupsi di Indonesia. Korupsi telah lama menjadi persoalan yang mempengaruhi berbagai sektor kehidupan, termasuk pelayanan publik. Sejak era reformasi pada tahun 1998, pemerintah Indonesia telah berupaya keras untuk memberantas korupsi dengan membentuk lembaga khusus seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan memperkuat peran institusi penegak hukum, termasuk kejaksaan.

Namun, praktik korupsi terus merajalela, bahkan di tingkat pemerintahan daerah seperti Dinas Pendidikan Kota Ternate. Korupsi gaji aparatur sipil negara merupakan salah satu bentuk korupsi yang merugikan negara dan masyarakat secara langsung. Para pelaku korupsi yang terlibat dalam tindakan ini tidak hanya melanggar hukum, tetapi juga merampok sumber daya yang seharusnya digunakan untuk memajukan kesejahteraan rakyat. Oleh karena itu, penyidikan terhadap tindak pidana korupsi penggelapan gaji ASN di Dinas Pendidikan Kota Ternate menjadi sangat penting.

Fenomena korupsi gaji aparatur sipil negara juga menjadi sorotan karena melibatkan oknum yang seharusnya bertanggung jawab dalam pengelolaan keuangan publik. Aparatur sipil negara adalah pilar utama dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Indonesia. Mereka menerima gaji dari kas negara sebagai imbalan atas tugas dan tanggung jawab mereka dalam menjalankan roda pemerintahan. Oleh karena itu, ketika terjadi

penggelapan gaji, hal ini bukan hanya merugikan negara, tetapi juga merusak kepercayaan masyarakat terhadap integritas dan transparansi pemerintah¹.

Dalam konteks Kejaksaan Negeri Ternate, penyidikan terhadap tindak pidana korupsi korupsi gaji aparatur sipil negara mencerminkan komitmen pemerintah daerah untuk memberantas korupsi di tingkat lokal. Kejaksaan sebagai lembaga penegak hukum di tingkat daerah memainkan peran sentral dalam proses penyidikan dan penuntutan pelaku korupsi. Ternate sebagai salah satu kabupaten di Provinsi Maluku Utara memiliki tantangan khusus dalam upaya pemberantasan korupsi, mengingat letaknya yang terpencil dan keterbatasan sumber daya.

Dalam kondisi demikian, Kejaksaan Negeri Ternate diharapkan dapat menjadi garda terdepan dalam memberantas praktik korupsi, termasuk korupsi gaji ASN. Penyidikan tindak pidana korupsi di tingkat daerah juga menjadi penting karena dapat memberikan sinyal kuat bahwa pemerintah lokal serius dalam memberantas korupsi dan menjunjung tinggi prinsip-prinsip good governance.

Dengan demikian, pendahuluan ini menggarisbawahi pentingnya penyidikan tindak pidana korupsi gaji aparatur sipil negara di Kejaksaan Negeri Ternate. Fenomena ini harus dipahami dalam konteks lebih luas tentang upaya pemberantasan korupsi di Indonesia serta peran kunci yang dimainkan oleh Kejaksaan Negeri sebagai lembaga penegak hukum di tingkat daerah. Penyidikan ini adalah langkah penting dalam memastikan bahwa integritas, transparansi, dan keadilan dalam pengelolaan keuangan publik dapat terwujud, memberikan manfaat nyata bagi rakyat Ternate, serta membawa Indonesia menuju masyarakat yang bebas dari korupsi.

Penyidikan tindak pidana korupsi gaji aparatur sipil negara (ASN) di Dinas Pendidikan Kota Ternate merupakan peristiwa yang menggambarkan kompleksitas dan dampak serius dari korupsi dalam konteks pemerintahan lokal. Data dan fakta yang tersedia mengungkapkan bahwa kasus ini bukanlah insiden terisolasi, melainkan bagian dari masalah yang lebih luas di Indonesia, di mana korupsi telah merasuk ke berbagai sektor pemerintahan dan menggerogoti kepercayaan publik. Pada tingkat daerah, Kejaksaan Negeri Ternate harus berhadapan dengan

¹ Hartono, B., Hasan, Z., & Khurniawan, H. B. (2022). Tinjauan Kriminologi Terhadap Tindak Pidana Korupsi Penggelembungan Anggaran Rehabilitasi Gedung Smpn 10 Metro Yang Dilakukan Oleh Aparatur Sipil Negara (Studi Putusan Nomor: 32/Pid. Sus-Tpk/2021/Pn. Tjk). *Sol Justicia*, 5(2), 192-204.

tantangan unik dalam upaya mereka untuk mengungkap dan menindak pelaku tindak pidana korupsi yang merugikan keuangan negara dan kesejahteraan masyarakat.

Data mengungkapkan bahwa korupsi adalah masalah serius di Indonesia, dengan indeks persepsi korupsi (Corruption Perceptions Index/CPI) pada tahun 2020 mencapai 37 poin, menunjukkan tingkat korupsi yang masih tinggi di negara ini. Korupsi gaji ASN adalah salah satu varian praktik korupsi yang telah mengakar dalam sejumlah institusi pemerintahan. Menurut data dari berbagai sumber, praktik ini telah menimbulkan kerugian signifikan bagi negara, dengan jumlah dana publik yang diambil secara tidak sah mencapai angka yang mencengangkan.

Kejaksaan Negeri Ternate, sebagai lembaga penegak hukum di tingkat daerah, memiliki tanggung jawab besar dalam mengatasi kasus-kasus seperti ini. Data menunjukkan bahwa lembaga ini berperan penting dalam mengungkap dan menuntut pelaku tindak pidana korupsi, termasuk yang terlibat dalam korupsi gaji ASN. Kejaksaan Negeri Ternate tidak hanya dihadapkan pada tugas mengungkap kasus-kasus tersebut, tetapi juga harus menghadapi tantangan dalam menghadirkan keadilan dan akuntabilitas dalam proses hukum.

Perlu dicatat bahwa kasus korupsi gaji ASN di Kejaksaan Negeri Ternate mencerminkan perlunya peran aktif lembaga penegak hukum di tingkat daerah dalam upaya pemberantasan korupsi. Data menunjukkan bahwa, meskipun ada lembaga nasional seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang bertugas untuk mengatasi korupsi di tingkat nasional, peran Kejaksaan Negeri di tingkat lokal sangat penting. Mereka memainkan peran kunci dalam memberantas korupsi yang mungkin lebih terkait dengan konteks dan kebutuhan daerah setempat.

Penyidikan tindak pidana korupsi gaji ASN di Dinas Pendidikan Kota Ternate juga mencerminkan komitmen pemerintah Indonesia dalam melawan korupsi. Data menunjukkan bahwa pemerintah Indonesia telah mengambil berbagai langkah untuk memberantas praktik-praktik korupsi yang merusak perekonomian dan merugikan rakyat. Penyidikan ini adalah salah satu upaya konkret dalam mewujudkan visi pemerintah untuk menciptakan pemerintahan yang bersih dan akuntabel.

Penelitian ini akan membahas lebih lanjut penyidikan tindak pidana korupsi gaji ASN di Dinas Pendidikan Kota Ternate Studi oleh Kejaksaan Negeri Ternate, mencakup data mengenai langkah-langkah konkret yang diambil oleh pihak berwenang, hambatan yang dihadapi dalam proses penyidikan, dan dampaknya terhadap upaya pemberantasan korupsi di

tingkat lokal. Dengan pemahaman yang lebih mendalam tentang kasus ini, kita dapat menggali lebih dalam tentang peran Kejaksaan Negeri Ternate dalam upaya pemberantasan korupsi di daerah tersebut dan bagaimana kasus ini mencerminkan tantangan yang dihadapi oleh lembaga penegak hukum di tingkat lokal dalam perang melawan korupsi yang merajalela.

Memilih topik "Penyidikan Tindak Pidana Korupsi Gaji Aparatur Sipil Negara di Dinas Pendidikan Kota Ternate Studi Kejaksaan Negeri Ternate" merupakan keputusan yang relevan dan bermakna, karena mencerminkan isu yang mendesak dan signifikan dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia. Fenomena korupsi gaji ASN di Dinas Pendidikan Kota Ternate menarik perhatian karena menyentuh pada akar permasalahan korupsi yang merugikan keuangan negara dan kesejahteraan masyarakat. Pendahuluan ini akan menjelaskan alasan pemilihan topik ini, dengan tujuan untuk memahami pentingnya penyidikan tindak pidana korupsi semacam ini dalam konteks Indonesia dan Kejaksaan Negeri Ternate.

Korupsi, sebagai masalah sistemik yang merasuk ke berbagai lapisan pemerintahan dan masyarakat di Indonesia, telah menyebabkan kerugian signifikan bagi negara dan rakyat. Data menggambarkan bahwa tingkat korupsi di Indonesia masih tergolong tinggi, dan hal ini memengaruhi pembangunan, pelayanan publik, dan keadilan sosial. Praktik korupsi gaji ASN, yang merampas dana yang seharusnya digunakan untuk kepentingan rakyat, adalah salah satu bentuk korupsi yang patut dicermati dan dibasmi.

Kejaksaan Negeri Ternate, sebagai lembaga penegak hukum di tingkat daerah, memiliki peran penting dalam upaya pemberantasan korupsi. Data menunjukkan bahwa lembaga ini memiliki tanggung jawab untuk mengungkap dan menuntut pelaku tindak pidana korupsi, termasuk dalam kasus penggelapan gaji ASN. Peran Kejaksaan Negeri Ternate menjadi sentral dalam memastikan keadilan dan akuntabilitas dalam penegakan hukum, khususnya dalam menghadapi kasus-kasus korupsi yang terkait dengan institusi pemerintahan di daerah.

Kasus korupsi gaji ASN di Dinas Pendidikan Kota Ternate juga mencerminkan perlunya peran lembaga penegak hukum lokal dalam upaya pemberantasan korupsi. Data menunjukkan bahwa korupsi tidak selalu terjadi di tingkat nasional; bahkan, dalam banyak kasus, praktik korupsi lebih berkorelasi dengan keadaan di tingkat daerah. Oleh karena itu, penyidikan semacam ini menggarisbawahi pentingnya peran Kejaksaan Negeri sebagai penegak hukum di tingkat lokal dalam menegakkan integritas dan akuntabilitas di sektor-sektor pemerintahan yang lebih dekat dengan masyarakat.

Penyidikan tindak pidana korupsi gaji ASN di Dinas Pendidikan Kota Ternate juga mencerminkan komitmen pemerintah Indonesia dalam upaya melawan korupsi. Data menunjukkan bahwa pemerintah Indonesia telah menegaskan tekadnya untuk memberantas korupsi dan menciptakan pemerintahan yang bersih dan akuntabel. Oleh karena itu, penyidikan ini adalah langkah konkret dalam mewujudkan visi tersebut dan menunjukkan bahwa pihak berwenang serius dalam menanggulangi praktik-praktik korupsi yang merugikan negara dan masyarakat.

Dalam konteks tersebut, pemilihan topik ini menjadi relevan dan bermakna. Dalam Proposal ini, kita akan menelaah lebih lanjut tentang penyidikan tindak pidana korupsi gaji ASN di Dinas Pendidikan Kota Ternate Studi Kejaksaan Negeri Ternate, dengan fokus pada data mengenai langkah-langkah yang diambil oleh pihak berwenang, hambatan yang dihadapi dalam proses penyidikan, dan dampaknya terhadap upaya pemberantasan korupsi di tingkat lokal. Dengan memahami lebih dalam tentang kasus ini, kita dapat memperoleh wawasan yang lebih baik tentang tantangan yang dihadapi oleh lembaga penegak hukum di tingkat daerah dan upaya yang ditempuh dalam memerangi korupsi yang merajalela.

Penelitian terdahulu yang relevan dengan topik "Penyidikan Tindak Pidana Korupsi pada Penggelapan Gaji Aparatur Sipil Negara di Kejaksaan Negeri Ternate" telah memberikan pandangan yang berharga terhadap kompleksitas masalah korupsi di Indonesia, serta peran lembaga penegak hukum dalam menghadapinya. Sejumlah studi dan penelitian telah menggali kasus-kasus korupsi serupa di tingkat nasional maupun daerah, termasuk dalam konteks pemerintahan daerah seperti Kejaksaan Negeri Ternate. Penelitian-penelitian tersebut telah memberikan pemahaman yang lebih dalam tentang permasalahan korupsi dan tantangan yang dihadapi oleh lembaga penegak hukum dalam memerangi praktik-praktik korupsi tersebut.

Penelitian sebelumnya mengonfirmasi bahwa korupsi adalah masalah serius di Indonesia. Hasil survei indeks persepsi korupsi (*Corruption Perceptions Index/CPI*) dan laporan dari berbagai organisasi internasional, seperti Transparency International, menunjukkan bahwa Indonesia memiliki tingkat korupsi yang tinggi. Praktik korupsi gaji ASN adalah salah satu varian korupsi yang terdokumentasi dalam penelitian-penelitian tersebut, dengan data yang mencerminkan kerugian signifikan bagi keuangan negara dan dampak negatif pada pelayanan publik.

Penelitian-penelitian sebelumnya juga menyoroti peran penting Kejaksaan Negeri dalam menangani kasus-kasus korupsi di tingkat daerah. Kejaksaan Negeri di berbagai daerah,

termasuk Ternate, memiliki tanggung jawab dalam mengungkap dan menuntut pelaku tindak pidana korupsi. Studi-studi ini menggarisbawahi pentingnya peran lembaga ini dalam menjalankan tugasnya dengan integritas dan profesionalisme untuk memastikan keadilan di tengah tantangan kompleks yang dihadapi dalam kasus-kasus korupsi².

Selain itu, penelitian terdahulu juga mencatat bahwa upaya pemberantasan korupsi harus melibatkan lembaga penegak hukum di tingkat lokal. Meskipun ada lembaga nasional seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), lembaga penegak hukum di tingkat daerah memiliki peran kunci dalam mengatasi praktik korupsi yang lebih terkait dengan konteks dan kebutuhan lokal. Penelitian ini memberikan landasan bagi pentingnya peran Kejaksaan Negeri Ternate dalam menyelidiki dan menindak kasus korupsi gaji ASN di wilayahnya.

Penelitian-penelitian sebelumnya juga menunjukkan bahwa pemberantasan korupsi adalah agenda prioritas pemerintah Indonesia. Upaya pemberantasan korupsi telah menjadi fokus utama pemerintah Indonesia dalam beberapa tahun terakhir. Dalam konteks ini, penyidikan tindak pidana korupsi gaji ASN di Kejaksaan Negeri Ternate mencerminkan komitmen pemerintah untuk menciptakan pemerintahan yang bersih dan akuntabel.

Dalam Proposal ini, akan memanfaatkan penelitian terdahulu dan temuan-temuan yang relevan untuk memahami lebih dalam penyidikan tindak pidana korupsi gaji ASN di Dinas Pendidikan Kota Ternate serta akan mencari wawasan dari penelitian-penelitian sebelumnya untuk melengkapi pemahaman kita tentang masalah korupsi di Indonesia, peran Kejaksaan Negeri dalam menghadapinya, serta pentingnya penyidikan kasus semacam ini dalam konteks upaya pemberantasan korupsi yang lebih luas. Dengan menggabungkan temuan-temuan dari penelitian terdahulu, kita akan dapat menyusun pemahaman yang komprehensif tentang topik ini dan mendukung upaya pemberantasan korupsi di tingkat lokal.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka permasalahan yang hendak diteliti oleh peneliti adalah sebagai berikut :

² Nafis, S. (2020). Pencegahan Dan Penindakan Tindak Pidana Korupsi Terhadap Aparatur Sipil Negara Berdasarkan Undang-undang No. 31 Tahun 1999 Yang Kemudian Dirubah Oleh Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Dan Undang Undang No. 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (Studi Kasus Nomor Perkara 67/Pid. Sus-Tpk/2018/Pn Bdg). Jurnal Hukum Media Justitia Nusantara (Mjn), 10(1), 39-64.

1. Bagaimana proses pelaksanaan penyidikan terhadap perkara tindak pidana korupsi oleh Kejaksaan Negeri Ternate?
2. Bagaimana pertimbangan Jaksa dalam menentukan status tersangka pada korupsi gaji ASN di Dinas Pendidikan Kota Ternate pada proses penyidikan?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang diharapkan oleh Peneliti dalam Tesis ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan penyidikan terhadap perkara tindak pidana korupsi gaji ASN di Dinas Pendidikan Kota Ternate oleh Kejaksaan Negeri Ternate.
2. Untuk mengetahui pertimbangan jaksa dalam menentukan status tersangka pada korupsi gaji ASN di Dinas Pendidikan Kota Ternate pada proses penyidikan.

1.4 Manfaat Penelitian

Sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas, maka penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat serta kontribusi yang baik dari segi teoritis maupun segi praktis.

a. Secara Teoritis

- Penyidikan kasus korupsi di Dinas Pendidikan Kota Ternate dapat memberikan wawasan teoritis yang kaya tentang korupsi di tingkat lokal. Hal ini membantu menggambarkan bagaimana faktor-faktor sosial, politik, dan ekonomi yang spesifik untuk daerah tersebut dapat mempengaruhi munculnya praktik korupsi.
- Penyidikan ini memberikan kontribusi terhadap pengembangan teori tentang penegakan hukum di tingkat lokal. Menghadapi tantangan dan keterbatasan yang unik di daerah tertentu, seperti Ternate, dapat menghasilkan pemahaman yang lebih dalam tentang bagaimana lembaga penegak hukum beroperasi dalam konteks geografis dan budaya yang berbeda.
- Melalui analisis kasus ini, penelitian teoritis dapat membongkar faktor-faktor pendorong korupsi, seperti tekanan ekonomi, kurangnya pengawasan, atau budaya korupsi yang berakar. Penyidikan kasus ini memungkinkan peneliti untuk memahami berbagai penyebab korupsi dan merumuskan teori yang lebih terperinci.

b. Secara Praktis

- Penyidikan dan penuntutan dalam kasus korupsi di Dinas Pendidikan Kota Ternate oleh Kejaksaan Negeri Ternate memiliki dampak langsung dalam mencegah korupsi di tingkat lokal. Keberhasilan dalam memproses kasus semacam ini dapat menjadi contoh dan memberikan sinyal kuat kepada calon pelaku korupsi untuk tidak melanggar hukum.
- Penyidikan tindak pidana korupsi ini dapat memperkuat posisi Kejaksaan Negeri Ternate sebagai lembaga penegak hukum di tingkat lokal. Hal ini meningkatkan kapasitas mereka untuk mengatasi kasus-kasus korupsi di masa depan dan memberikan perlindungan hukum kepada masyarakat.
- Keberhasilan dalam penyidikan tindak pidana korupsi di Kejaksaan Negeri Ternate dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap lembaga penegak hukum dan pemerintah daerah secara keseluruhan. Ini penting untuk membangun legitimasi pemerintah dan mengurangi ketidakpercayaan masyarakat terhadap institusi-institusi pemerintah.

1.5 Originalitas Penelitian

Sejauh penelusuran yang telah dilakukan, belum ditemukan penelitian atau kajian yang secara khusus membahas tentang penyidikan tindak pidana korupsi yang terkait dengan korupsi gaji aparatur sipil negara di Kejaksaan Negeri Ternate. Meskipun tindak pidana korupsi telah menjadi perhatian serius di Indonesia, penelitian yang mendalam mengenai korupsi gaji ASN dan bagaimana Kejaksaan Negeri Ternate melakukan penyidikan serta menghadapi tantangan dalam hal ini masih sangat terbatas. Oleh karena itu, penelitian ini akan memberikan kontribusi yang signifikan dalam pemahaman lebih lanjut tentang bagaimana sistem hukum dan penegakan hukum di Kejaksaan Negeri Ternate menangani kasus semacam ini. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat mengisi celah pengetahuan yang ada dalam konteks penanganan tindak pidana korupsi yang khususnya terkait korupsi gaji ASN, dan dapat memberikan rekomendasi yang bermanfaat untuk perbaikan sistem hukum dan penegakan hukum di Indonesia.

Untuk menguatkan penelitian, maka kiranya perlu penjelasan beberapa kata pokok yang menjadi variable penelitian referensi peneliti sebagai berikut:

1. Herawati, P09022150 (2018) Penyidikan Tindak Pidana Korupsi di Bidang pengadaan Barang dan Jasa di Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan.

Dalam penelitiannya penulis menganalisis pelaksanaan penyidikan tindak pidana korupsi di bidang pengadaan barang dan jasa oleh kejaksaan, serta factor-faktor yang menghambat dalam pelaksanaannya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan Penyidikan tindak pidana korupsi di bidang pengadaan barang dan jasa oleh Kejaksaan

Sulawesi Selatan adalah melalui Upaya penindakan berupa kegiatan operasi intelijen yusticial, Teknik pengembangan kasus dengan whistle blower dan justice collaborator serta Teknik audit investigative sebagai metode pencarian dan pengumpulan data, informasi dan temuan lainnya untuk mengetahui kebenaran atau bahkan kesalahan sebuah fakta dengan berkoordinasi dengan BPK/BPKP.

Sedangkan faktor menghambat dalam penyidikan tindak pidana korupsi di bidang pengadaan barang dan jasa adalah keterbatasan jumlah sumber daya manusia pada Jaksa Penyidik yang melakukan kegiatan intelijen dan pemeriksaan di tempat dan keterbatasan sumber dana/anggaran penanganan perkara dalam kegiatan penyidikan.

2. Nasrizal, 171022118 (2021) Penyidikan Tindak Pidana Korupsi di Bidang Pertanahan di Kejaksaan Negeri Kuantan Singingi.

Penelitian ini membahas proses penyidikan dimulai dengan pemanggilan saksi kemudian pemanggilan tersangka. Pengungkapan kasus tindak pidana korupsi oleh Kejaksaan Negeri Kuantan Singingi tahap penyidikan yaitu dengan menggunakan Teknik interogasi saksi pelapor whistle blower dan menggali informasi dari pelaku itu sendiri maupun informasi dari pihak media maupun LSM. Pada kasus ini dalam melakukan interogasi saksi, jaksa menggunakan Teknik audit investigative menggunakan baik oleh BPK maupun jasa akuntan public sendiri yang didatangkan pihak kejaksaan. Hambatan dalam proses penyidikan adalah karena keterbatasan sarana dan prasarana ataupun sumber daya manusia dan tersangka atau pun saksi yang berpindah tempat kerja ataupun domisili ataupun adanya tersangka yang buron sehingga membuat kasus ini a lot untuk diselesaikan.

Dari paparan para peneliti di atas dapat diambil kesimpulan bahwa ada terdapat kesamaan dan perbedaan dalam penulisan tesis ini.

Adapun kesamaan dalam penulisan adalah sebagai berikut :

- a. Terdapat persamaan tentang pengumpulan informasi berdasarkan BAP Saksi dan Menggunakan Teknik Audit Investigative menggunakan BPKP.
- b. Menggunakan metode penelitian yang sama yaitu metode Empiris

Sedangkan perbedaannya adalah Objek penelitian yang di gunakan adalah Penyidikan Tindak Pidana Korupsi Gaji Pegawai Negeri Sipil di Dinas Kota Ternate Studi Pada Kejaksaan Negeri Ternate.